



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: BI Proyeksikan Pertumbuhan Hanya 38%
Tanggal	: Selasa, 13 Juli 2021
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 11

BI Proyeksikan Pertumbuhan hanya 3,8%

Pemberlakuan PPKM darurat berkepanjangan akan menimbulkan tekanan terhadap APBN.

M ILHAM RAMADHAN
ilham@mediaindonesia.com

BANK Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi 3,8% di tahun 2021.

Perkirakan itu lebih rendah jika dibanding dengan hitungan sebelumnya, yakni pada kisaran 4,1% hingga 5,1% dengan titik tengah 4,6%.

"Asesmen kami menunjukkan, kalau PPKM darurat ini kita lakukan selama satu bulan

dan bisa menurunkan covid, pertumbuhan ekonomi kita akan turun ke sekitar 3,8%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR, kemarin.

Bank sentral juga memperkirakan tingkat inflasi hingga akhir tahun 2021 akan tetap berada di level rendah di bawah taksiran 3% plus-minus 1%.

Hal itu terjadi karena penurunan perekonomian dan daya beli masyarakat di tengah pandemi covid-19 yang masih terjadi dan membayangi

Indonesia. "Tentu saja, bagi kita upaya yang bukan mengendalikan inflasi, tetapi bagaimana mendorong permintaan, mendorong pertumbuhan, dan tentu saja itu menjadi fokus, termasuk juga Bank Indonesia," terang Perry.

Sementara itu, nilai tukar rupiah akan diupayakan untuk tetap stabil dan terjaga. Kendati mengalami pelemahan, Perry bilang, itu terjadi di banyak negara dan rupiah mengalami pelemahan yang relatif lebih rendah, yakni 3,1% (*year to date/ytd*).

BI mencatat nilai tukar rupiah pada semester I, yakni 14.280 per dolar Amerika Seri-

kat. Diperkirakan rupiah akan kembali mengalami tekanan dalam beberapa waktu ke depan. Namun, Perry memastikan pihaknya akan menjaga stabilitas rupiah di nilai fundamentalnya. "Kami juga akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar di pasar dengan tentu saja sejalan dengan mandat kami," jelasnya.

Perry menyampaikan cadangan devisa berada pada akhir Juni 2021 berada di angka US\$137,1 miliar. Jumlah itu dinilai lebih dari cukup untuk menjaga stabilitas.

Defisit menurun

Dalam rapat yang sama, pemerintah memperkirakan realisasi defisit anggaran 2021 akan lebih kecil dari yang dilakukannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Secara nominal defisit diproyeksikan akan mencapai Rp939,6 triliun, lebih rendah daripada yang ditargetkan, yakni Rp1.006,4 triliun.

"Ini suatu yang bagus, artinya APBN tetap bisa responsif membantu rakyat, dunia usaha, dan mengani covid. Namun, kita bisa mengurangi dan menjaga defisitnya dengan tingkat yang hati-hati," jelas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR, Senin (12/7).

Perkiraan susutnya defisit tersebut juga dilandasi dari hitungan pemerintah pada pendapatan negara yang diperkirakan akan mencapai Rp1.760,7 triliun, lebih tinggi dari yang ditargetkan APBN, yakni Rp1.743,6 triliun.

Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan APBN bakal tertekan jika pemberlakuan PPKM darurat berkepanjangan. Dia pun meminta pemerintah menyiapkan *worst case scenario* karena membutuhkan dukungan anggaran besar. "Bila keadaan seperti ini berlangsung lama, akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita," kata Said dalam keterangan resminya.

Skenario APBN ditahun ini dan 2022 ialah skenario pemulihan. Namun, APBN belum memitigasi skenario gelombang demi gelombang dan pandemi berlangsung lebih lama. "Dengan melihat situasi dan potensi risiko yang ada, selain *refocusing*, pemerintah perlu melakukan kebijakan kebijakan lebih jauh yang komprehensif," ujarnya. (Ins/E-1)